

Analisis Pengaruh Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Modal Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara

Harlifa, Ahmad, Muh. Armawaddin

Universitas Halu Oleo

harlifa16@gmail.com, ahmadbima778@gmail.com,

muhamad.armawaddin@uho.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of infrastructure capital expenditure and health capital expenditure on inclusive economic growth (Poverty and Unemployment) in 17 Regencies/Cities in Southeast Sulawesi Province. This study is a quantitative study using secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Southeast Sulawesi Province and the Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia. The analysis method used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) model using the Eviews 12 analysis tool. The results of the study show that infrastructure capital expenditure and health capital expenditure have a negative and insignificant effect on poverty. In addition, infrastructure capital expenditure has a negative and insignificant effect on unemployment and health capital expenditure has a positive and significant effect on unemployment.

Keywords: *Inclusive Economic Growth, Capital Expenditure, Poverty, Unemployment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (Kemiskinan dan Pengangguran) di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan alat analisis Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, belanja modal infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran dan belanja modal kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Belanja Modal, Kemiskinan, Pengangguran*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Pertumbuhan semacam ini tidak hanya berfokus pada peningkatan *output* semata, melainkan lebih menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya antara lain adalah penurunan tingkat

pengangguran, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan, serta pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi (Safitri et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan bentuk pertumbuhan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang, dengan tujuan mendorong kemajuan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan menekan kesenjangan sosial. Pertumbuhan ini dikatakan inklusif apabila mampu menurunkan tingkat kemiskinan, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Konsep ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap manfaat pertumbuhan dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau tidak merasakan dampak positif dari kemajuan ekonomi (Hapsari et al., 2013).

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat bergantung pada peran aktif pemerintah. Salah satu bentuk peran tersebut adalah melalui kebijakan fiskal, khususnya dalam hal pengalokasian anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Secara umum, besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk berbagai fungsi dapat mengalami perubahan setiap tahunnya, tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah. Pengeluaran pemerintah yang berpihak pada rakyat mencakup pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Safitri et al., 2021).

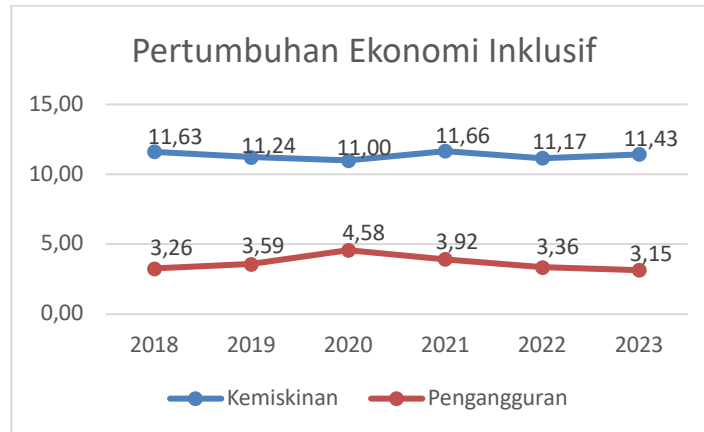
Pertumbuhan inklusif tidak hanya berfokus pada penciptaan peluang ekonomi baru, tetapi juga pada pemberian akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Suatu pertumbuhan disebut inklusif apabila mampu meningkatkan peran fungsi kesempatan sosial, yang dipengaruhi oleh rata-rata peluang yang tersedia dan bagaimana peluang tersebut didistribusikan di tengah masyarakat (Praseryantoko et al., 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan akademisi maupun praktisi pembangunan ekonomi. Menurut World Bank, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang merata dan mampu menciptakan kesetaraan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pasar, peningkatan konsumsi, dan kegiatan produksi yang menysasar masyarakat miskin, sehingga taraf hidup mereka dapat meningkat (Klasen, 2017).

Pertumbuhan ekonomi secara nasional dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Setiap wilayah, dengan karakteristik demografi, geografi, dan struktur ekonomi yang berbeda-beda, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi masih sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Arrfah & Syafri, 2022)

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023, target pertumbuhan ekonomi inklusif ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Pemerintah daerah diharapkan mampu merancang

dan menyusun program-program pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2018-2023)

Melihat grafik di atas, data kemiskinan dan pengangguran mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Meskipun demikian, angka kemiskinan cenderung menurun dari tahun 2018 hingga 2023. Selain itu, angka pengangguran mengalami lonjakan pada tahun 2020 hingga mencapai 4,58. Akan tetapi, dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi dari pertumbuhan ekonomi inklusif (PEI) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa mencapai target RPJMD. Meski demikian, penurunan tersebut tidak besar atau cenderung kecil.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi yang mampu membuka akses dan menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, meningkatkan taraf kesejahteraan, serta mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah yang merupakan inti dari konsep ekonomi inklusif. Dalam rangka mendukung pelaksanaannya, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu hasil dari kebijakan tersebut adalah terciptanya sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang layak dan kondisi kesehatan yang optimal (Hartati, 2021).

Selama periode tahun 2018-2023 alokasi anggaran belanja modal infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi. Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi inklusif yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, terdapat perbedaan pertumbuhan antara kabupaten/kota yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Pengaruh Belanja Modal Kesehatan Dan Belanja Modal Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengamati, mencermati, dan menggambarkan objek yang diteliti secara numerik, sebagaimana kondisi sebenarnya. Hasil penelitian kemudian disimpulkan berdasarkan fenomena yang tampak pada saat proses penelitian berlangsung (Arikunto, 2006). Jenis data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2023.

Model ekonometrik dalam menganalisis hipotesis penelitian ini ialah digunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial antara satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dimana dalam analisis memperhitungkan adanya jumlah individu dan waktu (Priyanto, 2022). Adapun alat Statistik yang digunakan ialah Eviews 12.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel dependen yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (PEI) yang terdiri dari variabel Kemiskinan dan Pengangguran. Sedangkan, variabel independen terdiri atas variabel Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Modal Kesehatan. Belanja modal infrastruktur dalam penelitian ini menggunakan data belanja modal perumahan/fasilitas dan Belanja modal kesehatan dalam penelitian ini menggunakan data belanja modal kesehatan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

1. Uji Pemilihan Model

Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji Chow yang dilakukan untuk membandingkan model *Pooled Least Square* (PLS) dengan model *Fixed Effect* menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua model, sehingga model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan PLS.

Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil uji ini juga menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak dan disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih konsisten dan sesuai digunakan dalam analisis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan pendekatan *Fixed Effect*, karena model ini mampu mengakomodasi heterogenitas individu (*cross-section*) yang bersifat tetap sepanjang waktu.

2. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel independen. Nilai koefisien korelasi antar pasangan variabel berada di bawah 0,80, yang menunjukkan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel bebas. Dengan demikian, model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas, sehingga hubungan antar variabel dalam penelitian ini tidak saling memengaruhi secara linear yang berlebihan.

Selanjutnya, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dilakukan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5% ($p\text{-value} > 0,05$), sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi memenuhi asumsi klasik dan estimasi yang dihasilkan dapat dianggap valid dan efisien.

3. Analisis Uji Hipotesis

Pada uji pemilihan model terpilih regresi metode *Fixed Effect Model*. Berikut ini adalah tabel hasil uji regresi *Fixed Effect Model*:

a) Kemiskinan

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel (Kemiskinan)

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/16/25 Time: 20:31				
Sample: 2018 2023				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 17				
Total panel (balanced) observations: 102				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.54536	2.274822	7.273255	0.0000
X1	-0.053304	0.028877	-1.845893	0.0685
X2	-0.105307	0.086670	-1.215037	0.2278
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.985943	Mean dependent var	12.71784	
Adjusted R-squared	0.982894	S.D. dependent var	2.930858	
S.E. of regression	0.383322	Akaike info criterion	1.086532	
Sum squared resid	12.19564	Schwarz criterion	1.575497	
Log likelihood	-36.41312	Hannan-Quinn criter.	1.284530	
F-statistic	323.4177	Durbin-Watson stat	2.291284	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil *output* dari Tabel 1, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (α) sebesar 16,545, artinya jika belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan, nilainya adalah 0, maka kemiskinan nilainya sebesar 16,545.

1. Pengaruh belanja modal infrastruktur terhadap kemiskinan

Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan belanja modal infrastruktur terhadap kemiskinan. Hal ini berdasarkan dengan melihat Prob. $0,06 > 0,05$ dan nilai *Coefficient* -0,053. Artinya, setiap peningkatan belanja modal infrastruktur sebesar 1%, maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,053%.

2. Pengaruh belanja modal kesehatan terhadap kemiskinan

Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan belanja modal kesehatan terhadap kemiskinan. Hal ini berdasarkan dengan melihat Prob. $0,22 > 0,05$ dan nilai *Coefficient* -0,105. Artinya, setiap peningkatan belanja modal infrastruktur sebesar 1%, maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,105%.

b) Pengangguran

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel (Pengangguran)

Dependent Variable: PENGANGGURAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/16/25 Time: 20:36
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.486797	0.793261	1.874285	0.0644
X1	-0.011950	0.010070	-1.186696	0.2387
X2	0.086822	0.030223	2.872730	0.0052
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.901959	Mean dependent var	3.298627	
Adjusted R-squared	0.880698	S.D. dependent var	0.386997	
S.E. of regression	0.133669	Akaike info criterion	-1.020478	
Sum squared resid	1.483002	Schwarz criterion	-0.531513	
Log likelihood	71.04440	Hannan-Quinn criter.	-0.822480	
F-statistic	42.42156	Durbin-Watson stat	1.419501	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil *output* dari Tabel 2, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta (α) sebesar 1,487, artinya jika belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan, nilainya adalah 0, maka pengangguran nilainya sebesar 1,487.

1. Pengaruh belanja modal infrastruktur terhadap pengangguran

Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan belanja modal infrastruktur terhadap kemiskinan. Hal ini berdasarkan dengan melihat Prob. $0,23 > 0,05$ dan nilai *Coefficient* -0,012. Artinya, setiap peningkatan

belanja modal infrastruktur sebesar 1%, maka akan mengurangi pengangguran sebesar 0,012%.

2. Pengaruh belanja modal kesehatan terhadap pengangguran

Terdapat pengaruh positif dan signifikan belanja modal kesehatan terhadap kemiskinan. Hal ini berdasarkan dengan melihat Prob. $0,00 < 0,05$ dan nilai *Coefficient* 0,087. Artinya, setiap peningkatan belanja modal infrastruktur sebesar 1%, maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0,087%.

1. Koefisien Determinan

a. Kemiskinan

Melihat nilai dari R Square pada tabel 1, maka didapatkan nilai sebesar 0,986 (98,6%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 98,6% variabel kemiskinan dan sisanya sebesar 1,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Pengangguran

Melihat nilai dari R Square pada tabel 2, maka didapatkan nilai sebesar 0,902 (90,2%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal infrastruktur dan belanja modal kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 90,2% variabel pengangguran dan sisanya sebesar 9,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menghasilkan bahwa belanja modal infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2023.

Dampak negatif dan tidak signifikan dari belanja modal infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoritis dan bukti empiris. Secara ideal, investasi pada infrastruktur seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Namun, data empiris menunjukkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur di wilayah ini belum memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat pembangunan infrastruktur yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, distribusi anggaran infrastruktur belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini ialah anggaran belanja modal jalan meningkat, tingkat kemiskinan akan meningkat sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara anggaran belanja modal

infrastruktur jalan dengan kemiskinan di Kota Kotamobagu (Monoarfa et al., 2022). Belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan belanja infrastruktur (perumahan/fasilitas umum), terutama terkait pemerataan dan efektivitas program pembangunan. Perlu dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah tertinggal yang lebih membutuhkan (Pausan et al., 2024) .

Terdapat penelitian yang tidak sejalan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun infrastruktur dianggap memiliki sedikit relevansi dengan pengurangan kemiskinan. Jika tata kelola dan kelembagaan diperkuat, maka keterkaitan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan bisa menjadi lebih kuat (Megawati & Sebayang, 2018).

2. Pengaruh Belanja Modal Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian menghasilkan bahwa belanja modal kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2023.

Belanja modal di sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara seharusnya dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal kesehatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Ketidaktepatan sasaran, seperti pembangunan fasilitas yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, menyebabkan efektivitas pengurangan kemiskinan menjadi rendah. Selain itu, selama pandemi COVID-19, sebagian besar anggaran kesehatan dialokasikan untuk penanganan darurat seperti pengadaan alat medis, vaksin, dan alat pelindung diri, sehingga anggaran untuk pembangunan infrastruktur kesehatan tertunda atau dialihkan untuk kebutuhan mendesak.

Hasil penelitian oleh Palenewen, bahwa pengeluaran publik dibidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sehingga Penyediaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin harus ditingkatkan sebagai prioritas utama dalam program & kebijakan yang memihak kepada penduduk tidak mampu. Karena hal tersebut diperlukan perencanaan, alokasi, dan penargetan program & kegiatan yang memihak kepada penduduk miskin. Alokasi dana kesehatan oleh Pemerintah Daerah harus ditingkatkan lagi dan memperhatikan aspek pemerataannya sehingga semua masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak (Palenewen et al., 2018).

Sedangkan, penelitian yang bertolak belakang, yakni menyatakan fungsi kesehatan relatif lebih dinikmati oleh penduduk non-miskin dan kurang dinikmati oleh penduduk miskin. Maka dalam belanja untuk fungsi kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sejalan dengan teori bila kebutuhan dasar penduduk dipenuhi, termasuk

kesehatan, maka pendapatan penduduk akan meningkat, sehingga mereka dapat keluar dari *poverty line* (Azwardi, 2014).

3. Pengaruh Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Pengangguran

Hasil pengujian menghasilkan bahwa belanja modal infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2023.

Belanja modal untuk infrastruktur idealnya berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal infrastruktur tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pengurangan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal. Belanja modal dalam wujud aset tetap seperti infrastruktur sangat penting untuk menunjang pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas (Modebe et al., 2012).

Sedangkan pendapat yang bertolak belakang dengan penelitian ini mengemukakan bahwa Infrastruktur jalan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap terciptanya lapangan kerja di Aceh (Muliadi & Amri, 2019). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abubakar bahwa pengeluaran publik memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan *output*, tetapi berpengaruh positif terhadap pengangguran di Nigeria. Yang mana pengeluaran publik di Nigeria mengarah ke hal-hal yang tidak produktif, hampir tidak mengarah kepada penciptaan lapangan kerja (Abubakar, 2016).

4. Pengaruh Belanja Modal Kesehatan Terhadap Pengangguran

Hasil pengujian menghasilkan bahwa belanja modal kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2023.

Walaupun belanja modal di bidang kesehatan umumnya berperan dalam menurunkan angka pengangguran, terdapat kondisi tertentu di mana peningkatan belanja tersebut justru berpotensi meningkatkan pengangguran. Selama masa pandemi COVID-19, meskipun belanja modal kesehatan naik, tingkat pengangguran juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat belanja modal kesehatan tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja, bahkan secara tidak langsung dapat memperburuk pengangguran. Di saat belanja sektor kesehatan meningkat, sektor lain mengalami penurunan signifikan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar.

Sebab tak seimbangnya tingkatan kesehatan penduduk dengan kuantitas kesempatan kerja baru hingga melahirkan angka kelahiran yang tinggi dan akan lahir keluarga miskin baru. Dengan tingginya angka kelahiran maka akan menyebabkan jumlah penduduk semakin meningkat, sehingga dalam jangka panjang lapangan kerja harus ditingkatkan, agar penduduk yang terus bertambah tidak menganggur (Fadillah & Sabar, 2023).

Namun, sebaliknya dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran Di Kota Makassar” oleh Akhmad, menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap angka. Hal ini yang menyebabkan sehingga belanja modal berpengaruh positif atau berbanding lurus dengan angka pengangguran (Pide, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan pembahasan yang dilakukan dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

1. Pengaruh belanja modal (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (kemiskinan) di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Belanja modal infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
 - Belanja modal kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
2. Pengaruh belanja modal (infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (kemiskinan) di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Belanja modal infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran.
 - Belanja modal kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan studi lebih lanjut terkait pengaruh belanja modal terhadap aspek sosial-ekonomi lainnya. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan analisis penelitian ini dengan metode yang lebih kompleks, seperti model dinamis panel data, dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mendalam mengenai hubungan antara belanja modal dan tingkat kemiskinan serta pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. B. (2016). Dynamic Effects of Fiscal Policy on Output and Unemployment in Nigeria: An Econometric Investigation. *CBN Journal of Applied Statistics, The Central Bank of Nigeria*.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta.
- Arrfah, A. P., & Syafri. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Info Artha*.
- Azwardi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Serta Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*.
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Klasen, S. (2017). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth in Developing and advanced Economies: Multiple Definitions, Open Questions and Some Constructive Proposals*. Bristol University Press.
- Megawati, E., & Sebayang, L. K. B. (2018). Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Economics Development Analysis Journal*.
- Modebe, N. J., Okafor, R. G., Onwumere, J. U. ., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*.
- Monoarfa, W. H., Walewangko, E. N., & Engka, D. (2022). Analisis Pengaruh Infrastruktur Pelayanan Dasar Terhadap Kemiskinan di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Muliadi, & Amri, K. (2019). Infrastruktur Jalan, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja: Bukti Data Panel Kabupaten Kota Di Aceh. *J-MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*.
- Palenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap IPM dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Pausan, Ramli, B., & Bato, A. R. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Economic Studies*.
- Pide, A. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran Di Kota Makassar. *ResearchGate*.
- Praseryantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. LP3ES: Prakarsa.
- Priyanto, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linear Dengan SPSS Dan Analisis*

Regresi Data Panel Dengan Eviews. Cahaya Harapan.

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik.*